POIA KEPEMIMPINAN NU DAN MUHAMMADIYAH SERTA PENGARUHNYATERHADAP FIQH DI INDONESIA (TELAAH KRITIS TENTANG PENGARUH POLITIK DALAM FIQH)

Abstrak

M. Jazuly Muthhar, NIM. 011932079

Masalah yang menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini adalah: bagaimanakah deskripsi pola kepemimpinan dewasa ini, sejauh mana defferensiasi mekanisme istimbath hokum antara NU dan Nluhammadiyah di dalam nenghadapi berbagai persoal an, sejauh mana pola kepemimpinan NU dan Muhammadiyah berpengaruh terhadap aplikasi fiqh di lingkungan masyarakat. Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan sosiohistoris, yaitu suatu metode yang dipakai untuk memperoleh bahan melalui pendekatan sosial dan sejarah terutama yang erat kaitannya dengan pokok bahasan, dan menggunakan Content analysis, yaitu menganalisa buku-buku maupun tulisan-tulisan yang ada selama ini yang sesuai dan berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini, sumber datanya menggunakan data primer dan sekunder, sedang metode analisa datanya dengan menggunkan metode induksi dan deduksi.

Penelitian ini memberikan suatu kesimpulan bahwa: (1) gaya kepemimpinan demokratik yang saat ini dianggap sebagai gaya kepemimpinan yang ideal memang telah dibuktikan oleh pemimpin ormas Islam NU dan Muhammadiyah ini. Akan tetapi ada sedikit perbedaan dimana NU juga memakai pola kharismatik untuk badan syuriahnya, (2) metode istinbath hukum atau mekanisme ijtihad antara NU dan Muhammadiyah ada sedikit perbedaan disamping persamaannya. Persamaannya adalah semuanya bermuara pada al Qur'an dan hadits sebagai sumber utama. Perbedannya, kalau NU dalam memutuskan suatu hokum tentang suatu masalah, maka yang didahulukan adalah bermadzhab secara qauli di dalam kitab mu'tabarah. Sedangkan Muhammadiyah langsung pada sumber utama ajaran Islam yaitu al Qur'an dan hadits dengan jalan ijtihad. Dan kalaupun bermadzhab, maka yang dilakukan adalah secara manhaji ( metodologi ), (3) gaya kepemimpinan yang dipakai dalam NU maupun Muhammadiyah ternyata tidak secara mutlak berpengaruh terhadap kebijakan - kebijakan hukumnya. Sebab hal itu bergantung terhadap sistem dan mekanisme yang ada untuk memutuskan suatu hukum melalui musyawarah secara ijma'iy. Dengan kata lain faktor individu sang pemimpin tidak terlalu besar berpengaruh terhadap keputusan-keputusan muktamar untuk kesepakatan tentang suatu hukum. melainkan faktor ekstern yang justru sangat berpengaruh pada kebijakan yang diambil termasuk juga pengaruh politik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id